

**PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENANGGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN ILIR
BARAT I KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**AFNI NURDIANA
NIM. 07011281924071**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
MEI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

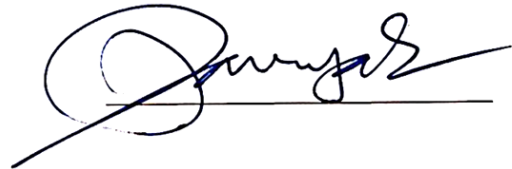
Oleh :

AFNI NURDIANA
07011281924071

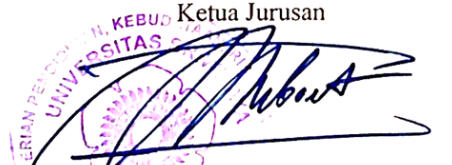
Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2023

Pembimbing

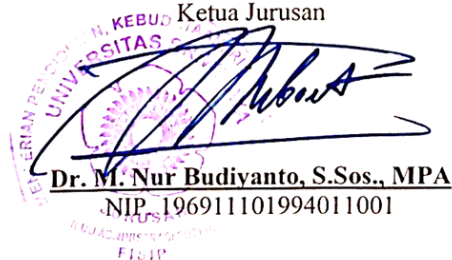
Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005



Mengetahui
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

“PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG”

Skripsi
Oleh :

AFNI NURDIANA
NIM. 07011281924071

Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 19 Mei 2023

Pembimbing :

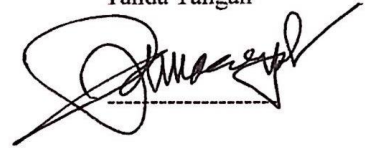
Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005

Penguji :

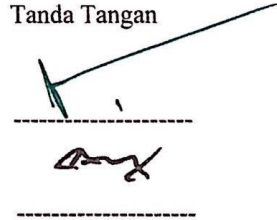
1. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

2. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Tanda Tangan



Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,
KEMENTERIAN KEMAHAKMAMAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afni Nurdiana

NIM : 07011281924071

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Proses *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Indralaya, Mei 2023



Afni Nurdiana

NIM. 07011281924071

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 6)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

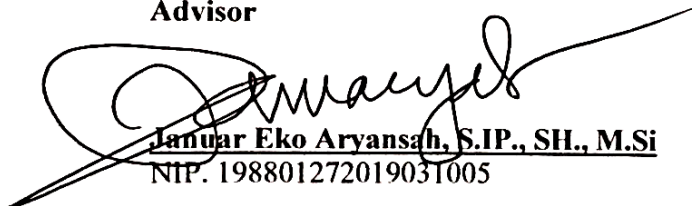
- 1. Allah SWT.*
- 2. Kedua orang tua saya*
- 3. Kakak-kakak dan keponakan saya*
- 4. Teman-teman saya yang selalu
memberikan semangat*
- 5. Almamater kebanggaan*

ABSTRACT

Flood disasters in recent times are disasters that often occur in Indonesia, including the city of Palembang. The occurrence of the flood disaster in Palembang City was caused by high rainfall, and because of the large number of residential areas and buildings resulting in a lack of water absorption, blockage of waterways or drainage, lack of public awareness in maintaining cleanliness, and increased waste generated due to population growth. Therefore this study aims to identify and identify collaborative governance processes in flood management in Ilir Barat I District, Palembang City. This study uses qualitative research with a descriptive approach. The theory used is the collaborative governance process model of Ansell and Gash (2008). Data collection techniques were carried out by interviews, observation, and documentation. The findings of this study are 1) face-to-face dialogue between stakeholders is routinely held, 2) trust building by frequent communication and discussion, 3) commitment to the process with the same goal and mission, namely for the welfare of the community, 4) share understanding by carrying out joint activities such as mutual cooperation and demolition of buildings, and 5) intermediate outcomes have had many good impacts such as a lack of percentage of inundation, many people are aware, and the demolition of buildings covering waterways. The conclusion shows that collaboration between stakeholders has been going well, but in terms of the private sector has not been absolutely involved.

Keywords: *collaborative governance, floods, flood prevention*

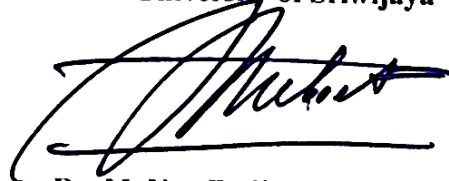
Advisor



Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005

Indralaya, Mei 2023

**Chairman of the Development of Public Administration
Faculty of Social Science and Political Science
University of Sriwijaya**



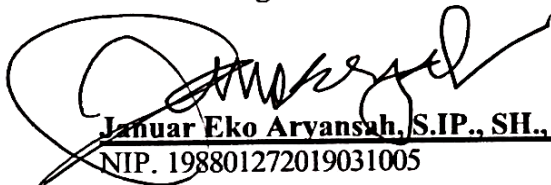
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Bencana banjir pada beberapa waktu terakhir ini merupakan bencana yang sering kali terjadi di Indonesia, tidak terkecuali yaitu Kota Palembang. Terjadinya bencana banjir di Kota Palembang ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi, serta karena banyaknya kawasan permukiman dan bangunan sehingga kurangnya resapan air, terjadinya penyumbatan saluran air atau drainase, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, serta meningkatnya sampah yang dihasilkan akibat pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi proses *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan yaitu model proses *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil temuan penelitian ini yaitu 1) dialog tatap muka antar pemangku kepentingan rutin diadakan, 2) membangun kepercayaan dengan seringnya berkomunikasi dan berdiskusi, 3) komitmen terhadap proses dengan tujuan dan misi yang sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, 4) pemahaman bersama dengan melakukan kegiatan bersama seperti gotong royong dan pembongkaran bangunan, dan 5) hasil sementara sudah banyak dampak baik yang ditimbulkan seperti kurangnya persentase genangan, banyaknya masyarakat yang sadar, dan pembongkaran bangunan yang menutupi saluran air. Kesimpulan menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan sudah berjalan dengan baik, namun dilihat untuk pihak swasta belum mutlak terlibat.

Kata Kunci : *collaborative governance*, bencana banjir, penanggulangan banjir

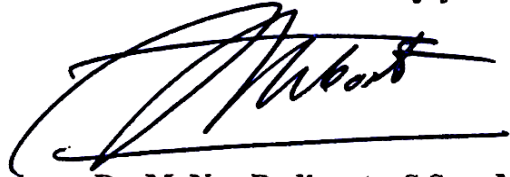
Pembimbing



Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005

Indralaya, Mei 2023

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan judul “Proses *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang”

Dengan selesainya skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan, baik materi maupun non materi yang telah memberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi berlangsung, kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Papa Alm. Suardi dan Mama Zulfina, kepada kakak Erfan, kakak Firly ayuk Nopita serta ponakan penulis yaitu Alfarezel terima kasih atas dukungan, doa dan memberikan semangat kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf. M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M selaku Wakil I Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku Wakil II Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si selaku Wakil III Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
9. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

11. Pihak-pihak atau pegawai-pegawai instansi tempat penulis melaksanakan penelitian yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kelurahan Lorok Pakjo, Komunitas Masyarakat Peduli Sungai, Peduli Banjir, serta juga masyarakat-masyarakat yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
12. Teman-teman penulis yang dari masa awal perkuliahan sampai sekarang, yaitu Amelia Putri, Niken Kurniati, Opi Dwi Putri, Tiara Febliani dan Zakiatul Zahara.
13. Teman-teman seperjuangan Administrasi Publik Angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Indralaya, November 2022

Penulis,

Afni Nurdiana

NIM. 07011281924071

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG.....	xv
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB IITINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.2 <i>Governance</i>	11
2.3 Banjir	21
2.4 Penelitian Terdahulu	31
2.5 Kerangka Penelitian	40
BAB IIIMETODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Definisi Konsep.....	42
3.3 Fokus Penelitian.....	43
3.4 Jenis dan Sumber Data	45
3.5 Informan Penelitian	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data	46
3.7 Teknik Analisis Data.....	48

3.8	Jadwal Penelitian.....	52
3.9	Sistematika Penulisan.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		55
4.1	Deskripsi Wilayah Penelitian.....	55
4.2	Deskripsi Informan Penelitian	75
4.3	Hasil Penelitian	77
4.4	Pembahasan	121
BAB V PENUTUP		129
5.1	Kesimpulan	129
5.2	Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA		132
LAMPIRAN		135

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Titik Genangan di Kecamatan Ilir Barat I Tahun 2021	6
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3. Fokus Penelitian	44
Tabel 4. Informan Penelitian	46
Tabel 5. Jadwal Penelitian.....	53
Tabel 6. Kependudukan Kota Palembang	56
Tabel 7. Kondisi Kota Palembang	56
Tabel 8. Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Palembang Tahun 2018	57
Tabel 9. Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.....	60
Tabel 10. Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2018.....	60
Tabel 11. Luas Kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I.....	63
Tabel 12. Jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Kecamatan Ilir Barat I.	64
Tabel 13. Jumlah Penduduk Kecamatan Ilir Barat I.....	65
Tabel 14. Rekap Persetujuan Bangunan Gedung Yang Sudah Retribusi Tahun 2022	65
Tabel 15. Daftar Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang	66
Tabel 16. Titik Genangan Berkurang di Kecamatan Ilir Barat I	110
Tabel 17. Kolam Retensi di Kecamatan Ilir Barat I	111
Tabel 18. Matriks Hasil Penelitian	126

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Titik Genangan di Kota Palembang Tahun 2021	5
Gambar 2. Model <i>Collaborative Governance</i> Ansell dan Gash (2008)	14
Gambar 3. Kerangka Pemikiran	41
Gambar 4. <i>Component of Data Analysis : Interactive Model</i>	49
Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang	61
Gambar 6. Peta Wilayah Kecamatan Ilir Barat I	62
Gambar 7. Struktur Organisasi Kecamatan Ilir Barat I Palembang	68
Gambar 8. Struktur Organisasi Kelurahan Lorok Pakjo Palembang	70
Gambar 9. Struktur Organisasi Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang	72
Gambar 10. Kegiatan Sosialisasi Pemangku Kepentingan	84
Gambar 11. Visualisasi Data <i>Stakeholders</i>	85
Gambar 12. Visualisasi Data <i>Face to Face Dialogue</i>	87
Gambar 13. Visualisasi Data <i>Trust Building</i>	90
Gambar 14. Visualisasi Data <i>Commitment To The Process</i>	94
Gambar 15. Jadwal Kegiatan Gotong Royong	100
Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Gotong Royong	101
Gambar 17. KMPSPB melakukan normalisasi dan tinjauan saluran air bersama Tim Monev Dinas PUPR Kota Palembang	101
Gambar 18. Lurah dan tim subdas PUPR Kota Palembang melakukan monitoring pembuatan saluran air serta normalisasi saluran air	102
Gambar 19. Lurah dan tim subdas PUPR Kota Palembang melakukan koordinasi terkait pembongkaran bangunan diatas aliran air	102
Gambar 20. Petugas PUPR Kota Palembang melakukan monitoring pompa air dan pengecekan debit air di titik hujan lebat	102
Gambar 21. Petugas PUPR Kota Palembang melakukan normalisasi saluran air	103
Gambar 22. Petugas PUPR Kota Palembang melakukan pembongkaran bangunan liar	103
Gambar 23. Petugas PUPR Kota Palembang melakukan perbaikan pompa air	103

Gambar 24. Petugas PUPR Kota Palembang persiapan dalam meninjau lokasi genangan dan pemeliharaan drainase	104
Gambar 25. Pompa Air Besar Milik PUPR.....	104
Gambar 26. Visualisasi Data <i>Shared Understanding</i>	105
Gambar 27. Sebelum dan Setelah Pembongkaran Bangunan	112
Gambar 28. Visualisasi Data <i>Intermediate Outcomes</i>	113
Gambar 29. Visualisasi Data Faktor Pendorong	117
Gambar 30. Visualisasi Data Faktor Penghambat	120

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Skripsi.....	136
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	137
Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian	142
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Usulan Penelitian	145
Lampiran 5. Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi.....	146
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Skripsi	147
Lampiran 7. Lembar Perbaikan Komprehensif	148
Lampiran 8. Peraturan Perundang-undangan dan Surat Keputusan.....	149
Lampiran 9. Pedoman Wawancara.....	151
Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara.....	153
Lampiran 11. Dokumentasi Penulis	156

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG

<i>Collaborative Governance</i>	:	(Kolaboratif Pemerintahan) Pengelolaan pemerintah yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan
<i>Commitment to the process</i>	:	Komitmen pada proses
Drainase	:	Tempat pembuangan massa air secara alami atau buatan
<i>Face-to-face dialogue</i>	:	Dialog tatap muka
<i>Intermediate outcomes</i>	:	Dampak antara atau pertengahan
IB I	:	Iilir Barat I
KMPSPB	:	Komunitas Masyarakat Peduli Sungai, Peduli Banjir dan Lingkungan Kota Palembang
MDGs	:	<i>Millenium Development Goals</i>
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
SDGs	:	<i>Sustainable Development Goals</i>
<i>Shared understanding</i>	:	Pemahaman bersama
<i>Stakeholders</i>	:	Pemangku Kepentingan
<i>Trust Building</i>	:	Membangun kepercayaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana merupakan rangkaian peristiwa alam yang murni gejala alam ataupun non alam serta dapat juga karena perbuatan manusia yang tidak menjaga alam dengan baik sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan berdampak psikologis. Berbagai bencana terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor yang dimana bencana-bencana tersebut kerap kali merenggut korban jiwa. Salah satu bencana yang sering kali terjadi di daerah Indonesia pada beberapa waktu terakhir ini yaitu banjir.

Banjir dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 merupakan keadaan dimana terendamnya suatu daratan atau daerah karena volume air yang meningkat. Banjir ini dapat disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan rendahnya permukaan tanah dibandingkan dengan muka air laut, selain itu juga dapat disebabkan karena ulah manusia sendiri, seperti penggunaan lahan yang semauanya, penggundulan hutan, membuang sampah sembarangan, serta banyaknya pembangunan yang menyebabkan kurangnya resapan air yang ada.

SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan sebuah program pembangunan berskala dunia yang bersifat universal, yang terdapat sasaran, tujuan dan indikator pembangunan berkelanjutan yang menyempurnakan dari MDGs (*Millenium Development Goals*) yang diselenggarakan dari tahun 2000-2015. SDGs ini dibentuk pada tanggal 25 September 2015 dengan memiliki 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator sasaran yang diselenggarakan pada tahun

2016-2030. Dari ke 17 tujuan yang terdapat dalam SDGs, tujuan poin ke 13 merupakan tujuan yang berkaitan dengan topik permasalahan penelitian ini. Tujuan poin ke 13 ini adalah Penanganan Perubahan Iklim yang dimana target dari tujuan ini yaitu memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam; mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional; meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim; melaksanakan komitmen negara maju pada komitmen negara maju pada *the United Nations Framework Convention on Climate Change*; serta menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.

Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan dengan berbagai bencana alam. Bencana banjir di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan pada setiap daerahnya. Akibatnya, peningkatan banjir juga berdampak pada risiko yang harus ditanggung oleh masyarakat dari segi fisik, sosial, dan ekonomi seperti rusaknya infrastruktur, terhambatnya kegiatan ekonomi, hilangnya mata pencaharian, dan juga merenggut korban jiwa. Sehingga Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam penanggulangan bencana banjir ini lebih optimal dengan melalui *collaborative governance*. Dengan melalui *collaborative governance* ini dapat mampu mengakomodirkan setiap upaya penanggulangan bencana, baik dari *stakeholders*, sumber daya manusia, maupun sarana prasarana

yang mendukung penanggulangan banjir. Penanggulangan banjir ini tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, namun tanggung jawab semua pihak. Dalam *collaborative governance* terkait dengan penanggulangan banjir ini dapat meliputi pemerintah, swasta dan juga masyarakat agar bersama-sama melakukan upaya penanggulangan banjir menjadi lebih maksimal sehingga dilakukannya kolaboratif.

Menurut Ansell dan Gash (2008) dalam (Sunu, 2020: 42), mengemukakan bahwa *collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung Pemangku kepentingan “*non-state*” di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset. Selanjutnya menurut DeSeve dalam (Sunu, 2020: 42), mendefinisikan *collaborative governance* adalah sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas batas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang dikonsepsi dan definisi kesuksesan yang jelas. Kemudian menurut Agrawal dan Lemos dalam (Sunu, 2020: 42), mendefinisikan bahwa *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya “*multi-partner governance*” yang meliputi sektor privat/swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat “*hybrid*” seperti halnya kerjasama publik-privat-sosial.

Sebagai pusat pertumbuhan sosial dan ekonomi dari tingkat lokal hingga global, kawasan perkotaan merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap

banjir. Hal ini dapat disebabkan oleh kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti pertumbuhan penduduk yang cepat, pertumbuhan kegiatan ekonomi, degradasi lingkungan, dan proses urbanisasi di perkotaan yang tidak didukung oleh perencanaan dan pengelolaan kota yang memadai (Azhar et al., 2020).

Permasalahan banjir ini juga terjadi di Kota Palembang, sehingga untuk dapat menindaklanjuti permasalahan banjir tersebut maka pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pasal 30 Ayat 2 memuat bahwa Seksi Pengendalian Banjir mempunyai tugas menyusun perencanaan teknik dan pengaturan sistem sungai, menginventarisasi permasalahan banjir, pendataan titik rawan banjir serta mengatur pembudidayaan lahan di dataran banjir dan DAS.

Permasalahan banjir di Kota Palembang timbul pada saat curah hujan yang tinggi, sehingga timbulnya banjir dan genangan air di beberapa titik di Kota Palembang. Selain dikarenakan faktor curah hujan yang tinggi, permasalahan banjir ini juga dapat disebabkan dengan beberapa faktor lainnya, yaitu sebagai berikut.

1. Banyaknya kawasan permukiman dan bangunan sehingga berakibat kurangnya resapan air yang ada.
2. Terjadinya penyumbatan saluran air/drainase pada kawasan yang mengalami banjir.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, seperti membuang sampah di sungai sehingga membuat sungai menjadi tercemar dan menghambat aliran air.

4. Serta akibat pertumbuhan penduduk meningkatnya juga sampah yang dihasilkan.

Banjir di Kota Palembang ini pada setiap wilayahnya sudah terdapat titik genangan. Terhitung pada tahun 2021 terdapat 66 lokasi genangan air yang ada di Kota Palembang, sehingga banjir di Kota Palembang ini sudah terjadi pada setiap kecamatannya. Banjir di Kota Palembang ini dapat mencapai 30 cm atau sebetis orang dewasa yang dimana dapat mengganggu perjalanan dalam berkendara. Berikut merupakan daftar data titik genangan air di Kota Palembang tahun 2021.

Gambar 1. Data Titik Genangan di Kota Palembang Tahun 2021



Sumber : Satu Data Palembang

Berdasarkan tabel data titik genangan di Kota Palembang tahun 2021 di atas, bahwasannya terdapat 66 lokasi titik genangan air dari 15 kecamatan di Kota Palembang yang terhitung pada tahun 2021. Titik genangan air di Kota

Palembang ini hampir terjadi di seluruh bagian Kota Palembang, yang dapat dilihat dari tabel di atas hampir seluruh wilayah di Kota Palembang memiliki titik genangan yang terbentang dari kecamatan satu ke kecamatan lainnya. Kecamatan yang paling banyak titik genangannya terdapat pada kecamatan Ilir Barat I, Ilir Timur I, Ilir Timur II, dan juga Alang-alang Lebar.

Tabel 1. Data Titik Genangan di Kecamatan Ilir Barat I Tahun 2021

No.	Lokasi Genangan	Kecamatan
1.	Jl. Prameswara dan Sekitarnya	Ilir Barat I
2.	Jl. Angkatan 45	Ilir Barat I
3.	Jl. Angkatan 45 (Sumpah Pemuda)	Ilir Barat I
4.	Jl. Demang Lebar Daun (Depan SMK N 2 Palembang)	Ilir Barat I
5.	Jl. Demang Lebar Daun (Depan Kolam Retensi RS. Siti Khodijah)	Ilir Barat I
6.	Jl. Demang Lebar Daun (Depan RM. Bang Rio)	Ilir Barat I
7.	Jl. Demang Lebar Daun (Depan SPBU Bengkel Pass)	Ilir Barat I
8.	Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara (Jalan Seruni)	Ilir Barat I
9.	Jl. Sultan Muh. Mansyur (Depan Universitas Terbuka)	Ilir Barat I
10.	Jl. Puncak Sekuning	Ilir Barat I
11.	Jl. Macan Kumbang - Jalan Kancil Putih	Ilir Barat I

Sumber : Satu Data Palembang

Berdasarkan tabel data titik genangan di Kecamatan Ilir Barat I tahun 2021 diatas, bahwa pada Kecamatan Ilir Barat I ini merupakan salah satu kecamatan yang memiliki titik banjir yang cukup banyak dari beberapa kecamatan yang ada

di Kota Palembang, yang dimana pada kecamatan ini memiliki 11 titik lokasi genangan air.

Pemerintah Kota Palembang sudah melakukan upaya dalam menangani bencana banjir ini yaitu dengan melakukan pembangunan *drainase* atau saluran air serta juga kolam retensi. Kolam retensi ini berfungsi untuk menggantikan peran resapan yang dijadikan pembangunan seperti permukiman ataupun perkantoran, maka dengan adanya kolam retensi ini akan menggantikan peran resapan ke dalam tanah. Namun, walaupun dengan adanya kolam retensi yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Palembang, bencana banjir ini juga masih terjadi di beberapa daerah di Kota Palembang sehingga dengan masih terjadinya juga bencana banjir ini dapat menandakan pembangunan sektor tersebut belum cukup optimal.

Tentunya dengan adanya permasalahan ini, maka diperlukannya perhatian lebih agar permasalahan ini dapat diatasi apabila tidak ditanggapi dengan serius akan terus mengalami permasalahan yang lebih banyak lagi dan akan terus merugikan dikemudian hari. Pemerintah Kota Palembang dalam penanggulangan banjir ini dapat melakukan kembali konsep kerjasama antarpemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir yang dimana pemangku kepentingannya berperan aktif sesuai dengan kerjanya.

Dalam proses *collaborative governance* harus di dukung oleh unsur-unsur yang terkait, dimana unsur-unsur tersebut dilihat dari teori proses *collaborative governance* Ansell & Gash (2008) yang terdiri dari, sebagai berikut.

1. *Face-to-face dialogue* atau dialog tatap muka.
2. *Trust building* atau membangun kepercayaan.

3. *Commitment to process* atau komitmen terhadap proses.
4. *Shared understanding* atau pemahaman bersama.
5. *Intermediate outcomes* atau hasil antara/pertengahan.

Dalam menangani permasalahan banjir di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ini, sehingga Pemerintah Kota Palembang melakukan *collaborative governance* dengan berbagai pemangku kepentingan yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan kerjasama dengan pemerintah seperti Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I serta Komunitas Masyarakat Peduli Sungai, Peduli Banjir dan Lingkungan Kota Palembang dan masyarakat juga turut melakukan kerjasama dalam mengatasi permasalahan banjir tersebut. Karena dengan masyarakat ikut dalam kerjasama dalam menangani permasalahan banjir ini setidaknya dapat mengurangi dampaknya dan menyukseskan upaya penanganan banjir.

Penelitian terkait *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana ini sudah banyak teliti serta juga dalam penanggulangan banjir. Namun, penelitian terkait penanggulangan banjir di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang masih terbatas. Berdasarkan dengan penelitian terdahulu yang telah peneliti lihat, bahwa memiliki banyak perbedaan dan juga ada persamaannya. Persamaan dalam studi *literatur review* dengan penelitian peneliti yaitu, antara lain : semua penelitian terdahulu yang peneliti lihat membahas *collaborative governance*, menggunakan jenis penelitian kualitatif dan beberapa menggunakan pendekatan deskriptif (Mutiarawati & Sudarmo (2021); Machruf et al. (2020);Khoirurrosyidin et al. (2021); Masyhuri et al. (2021); dan Pratikno & Kurniadi (2021)), serta beberapa menggunakan teori Ansell dan Gash (Setiawan et al. (2021); Machruf et al. (2020); Masyhuri, et. al (2021);dan Pratikno & Kurniadi (2021)). Selanjutnya, perbedaan

dalam studi *literatur review* dengan penelitian peneliti dan sebagai pembaharuan dari penelitian peneliti yaitu, antara lain : fokus penelitian yaitu proses *collaborative governance*, lebih khusus dalam penanggulangan bencana banjir (Sihaloho (2022); dan Setiawan et al., (2021)), menggunakan teori Ansell dan Gash khususnya teori proses *collaborative governance*(Machruf et al. (2020); dan Pratikno & Kurniadi (2021), serta perbedaan pada lokusnya.

Berdasarkan dengan uraian permasalahan dan studi *literatur review* yang sudah dilakukan, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan proses *collaborative governance*. Pada penelitian ini dilihat permasalahan-permasalahan yang muncul serta juga bencana banjir pada beberapa waktu terakhir ini sedang meningkatnya yang menyebabkan bencana banjir terjadi dimana-mana. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana para pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan banjir, maka penelitian ini berjudul “Proses *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Banjir Di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana proses *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengidentifikasi proses *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yang diuraikan sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya terkait proses *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terkait proses *collaborative governance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk dapat menjadi masukan dan informasi bagi pemerintah dan masyarakat mengenai proses *collaborative governance* dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Argyo Demartoto. (2019). Kajian Refleksivitas Masyarakat Risiko dalam Pengembangan Pariwisata Siaga Bencana Berbasis Collaborative Governance. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i1.586>
- Azhar, A., Sobri, K. M., & Halim, A. (2020). Law Enforcement of Waste Management in An Effort to Reduce Flood Risk in Indonesia. *Jambe Law Journal*, 3(1), 37–64. <https://doi.org/10.22437/jlj.3.1.37-64>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2017). *Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. https://siaga.bnpb.go.id/hkb/po-content/uploads/documents/Buku_Saku-10Jan18_FA.pdf.
- Endah, P. T., Wilujeng, S. A., Rifka, F., Achmad, S., & Imbalan, Z. (2020). *Pemanfaatan NVIVO Dalam Penelitian Kualitatif*. 1–125. <https://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2021/10/b5-Pemanfaatan-NVIVO-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik Volume*, 5(3), 1–13.
- Fitriani, R, S., et al. (2021). *Definisi Banjir: Seri Ensiklopedia Bencana Banjir*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Fitriani, R, S., et al. (2021). *Cara Penanggulangan Bencana Banjir: Seri Ensiklopedia Bencana Banjir*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Francis Fukuyama. (2007). *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam.

- Keputusan Walikota Palembang Nomor 286/KPTS/DPUPR/2021 Tentang Penetapan Komunitas Peduli Sungai, Banjir dan Lingkungan Kota Palembang.
- Khoirurrosyidin, Nasution, R. D., Triono, B., & Hilman, Y. A. (2021). Dinamika Praktik Collaborative Governance Di Bidang Kebencanaan Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. *Jurnal Agregasi*, 9(November), 131–138. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i2.5281>
- Machruf, I. N., Hermawan, D., & Meutia, I. F. (2020). Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Collaborative Governance. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 129–146. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i1.25>
- Malyani, T., & Mashur, D. (2019). Collaborative Governance Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 59–118. <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v10i2.7870>
- Masyhuri, A., Purnaweni, H., Herawati, A. R., & Priyadi, B. P. (2021). Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Manajemen Bencana Tanah Longsor Di Kota Semarang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 854–862. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.759>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M., Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis. In *News.Ge*. USA Sage Publications. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Mutiarawati, T., & Sudarmo. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*, 1(2), 82–98. <https://doi.org/10.20961/wp.v1i1.50892>
- Pratikno, H., & Kurniadi, A. (2021). Kolaboratif Pengelolaan Candi Borobudur Dalam Penanggulangan Bencana Gunung Merapi. *Edukasi IPS*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.21009/EIPS.005.1.01>

- Setiawan, R. S. (2019). Collaborative Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Dalam Menanggulangi Kebakaran Lahan Di Kota Dumai. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 5(2), 62–68. [https://doi.org/10.25299/wedana.2019.vol5\(2\).4677](https://doi.org/10.25299/wedana.2019.vol5(2).4677)
- Setiawan, B. A. P., Yulyana, E., & Aryani, L. (2021). Collaborative Governance dalam Penanggulangan Banjir Di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(8), 53–63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5746176>
- Sihaloho, N. T. P. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 6(1), 161. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.161-174>
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung : Alfabeta.
- Sunu, R. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro Press.
- Tim, R. K. B. I. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In *Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Yayasan IDEP. (2007). *Penanggulangan bencana berbasis masyarakat : berisi keterangan yang jelas untuk sebelum, saat, sesudah bencana : panduan umum*. Bali : Yayasan IDEP.